

Ke-Papuaan Pada Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas Kota Jayapura

¹Susanto T. Handoko

¹Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Cenderawasih
susantoth15@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sejarah diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan atau isu-isu terkini baik dalam konteks lokal, nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan materi Ke-Papuaan dalam buku teks Sejarah Nasional. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis buku teks dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah lokal Papua yang memuat materi Ke-Papuaan dalam buku teks Sejarah Nasional Indonesia masih minim dinarasikan. Pentingnya pembelajaran sejarah di Papua yang memuat materi relasi Ke-Papuaan dan Ke-Indonesiaan akan menguatkan integrasi bangsa. Materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan masa depan.

Kata kunci: *Pembelajaran Sejarah, Ke-Papuaan, Kota Jayapura*

PAPUAAN-NESS IN LEARNING HISTORY OF SENIOR HIGH SCHOOL OF JAYAPURA CITY

Abstract

History education is expected to adapt to current developments or issues in local, national, and global contexts. This study aims to construct the Papuan-ness material in the National History textbook. The research approach that the researcher uses is a qualitative approach with textbook analysis using critical discourse analysis methods. The results of the study indicate that the learning of local Papuan history which contains Papuan-ness material in the Indonesian National History textbook is still minimally narrated. The importance of learning history in Papua which contains material on relations between Papuan-ness and Indonesian-ness will strengthen the integration of the nation. Historical education materials can develop the potential of students to recognize the values of the nation that were fought for in the past, maintained and adapted for today's life, and further developed for future life.

Keywords: *Learning History, Papuan-ness, Jayapura City*

PENDAHULUAN

Praktik pembelajaran sejarah SMA di Kota Jayapura (Papua) pada dasarnya ada dua problem utama yaitu dari sisi siswa dan guru. Problem pertama dari sisi siswa, yaitu keterasingan siswa dengan konten (materi) pelajaran. Ketidakkontekstual muatan materi karena sebagian besar materi sejarah jauh dari realitas kehidupan sehari-hari siswa karena setting dan lokalitas umumnya dari luar Papua. Oleh karena itu pendidikan sejarah di Papua harus dicirikan secara kontekstual parsial. Kontekstual dalam arti menyesuaikan dengan aspek sosial budaya masyarakat Papua. Pengembangan Kurikulum sejarah khas/khusus Papua merupakan keniscayaan. Problem yang kedua adalah dari sisi guru yaitu rendahnya kompetensi materi sejarah lokal Papua dan penerapan strategi pembelajaran yang tidak tepat.

Problem mendasar pembelajaran sejarah SMA di Papua baik dari sisi siswa dan guru tersebut membawa dampak pada tidak ada proses pencarian makna dalam sejarah. Pembelajaran sejarah cenderung hanya sebagai proses *transfer of knowledge* sehingga pembelajaran sejarah sebagai praksis pendidikan sejarah tidak mampu diaktualisasikan secara optimal. Problem pembelajaran sejarah di Papua juga ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, yang prinsipnya bahwa sejarah menjadi mata pelajaran yang membosankan, siswa pada akhirnya tidak tertarik dengan sejarah karena pengetahuan hafalan (kognitif) dianggap tidak berguna (Nafi'ah & Utami, 2017). Selanjutnya sebagian besar guru masih cenderung menggunakan strategi pembelajaran ekspositori; penggunaan sumber dan media pembelajaran yang kurang variatif (Sutiyah, 2013, p. 121). Pembelajaran sejarah seharusnya tidak semata-mata berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah sebagai kumpulan informasi fakta sejarah tetapi juga bertujuan menyadarkan siswa atau membangkitkan kesadaran sejarahnya (Cowgill & Waring, 2017, p. 115; Suryani, 2013, p. 209). Selain itu pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu avonturir bersama dari pendidik maupun siswa (Agung, 2014, p. 127). Persoalan pendidikan sejarah tersebut tentunya juga menjadi persoalan bagi pemangku pendidikan di Papua (Jayapura).

Oleh karena itu bagaimana membuat pendidikan sejarah dapat dihayati (afektif) oleh siswa dan tidak sekedar menjadi pengetahuan hafalan (kognitif). Praktik pendidikan sejarah yang membosankan perlu ditelusuri faktor penyebabnya. Menurut Susanto Zuhdi (2017, p. 136) ada tiga faktor pelajaran sejarah yang membosankan yang berkaitan dengan konten dan strategi pembelajaran. Pertama, materi terlalu banyak sehingga seperti dipaksakan dan harus selesai pada waktunya dan alasan dari guru terlalu kecilnya alokasi waktu atau jam pelajaran. Kedua, penyampaian materi yang tidak kreatif dan kurangnya ilustrasi yang diberikan guru. Ketiga, materi yang diberikan itu-itu saja dan akan berulang-ulang diberikan sejak SD sampai SMA karena kurang atau mungkin sekali tidak adanya buku yang baik sebagai buku teks (*textbook*).

Berkaitan dengan buku teks, yaitu buku teks Sejarah Nasional SMA Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam kajian ini peneliti (penulis) akan menganalisis narasi Ke-Papuaan (sejarah lokal Papua). Adapun hasil analisis akan peneliti gunakan sebagai alternatif dalam pilihan solusi

bagi guru sejarah dalam menarasikan dan mengkonstruksikan muatan materi Ke-Papuaan dalam praktik pembelajaran di kelas.

Oleh karena itu, untuk menguatkan konten lokal Papua, sangat penting menerapkan pembelajaran sejarah kritis. Materi pembelajaran sejarah harus dapat ditarik relasinya dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh siswa. Praktik pembelajaran sejarah kritis lebih bermakna bagi siswa karena ada relasi antara peristiwa masa lalu dengan masalah (isu) kontemporer yang sedang dihadapi oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah harus mengembangkan/menerapkan konsep ilmu sosial. Pengembangan konsep ilmu sosial memiliki peranan penting dalam mengembangkan pemahaman serta kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini dapat memasukkan semua kelompok masyarakat sebagai tokoh sejarah, termasuk para siswa di dalamnya. Sejarah tidak hanya menekankan pada perkembangan nasional, tetapi juga memasukkan isu-isu lokal (sejarah lokal) yang lebih relevan dengan kepentingan siswa. Pembelajaran sejarah dapat disajikan dengan menggunakan beragam pendekatan dengan cara menjadikan siswa sebagai pembelajar yang aktif sekaligus sebagai pelaku sejarah pada jamannya.

Konstruksi pembelajaran sejarah kritis tentunya memiliki relevansi dengan sejarah nasional – dalam konteks ini relasi antara sejarah lokal Papua dengan sejarah nasional Indonesia. Pembelajaran sejarah yang berkontribusi pada proses integrasi bangsa di negara yang multikultur (Indonesia) ini penting untuk dikaji, khususnya pemangku kepentingan pendidikan di Tanah Papua. Rendahnya wawasan Ke-Indonesiaan salah satu indikatornya adalah kurangnya kesadaran atas identitas nasionalnya (Ke-Indonesiaan), dan menipisnya semangat patriotisme patut menjadi cermin dan keprihatinan para pemangku kepentingan di Indonesia, khususnya ranah pendidikan.

Mata pelajaran sejarah memiliki kontribusi strategis dalam pembentukan watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sejarah nasional menekankan pada sudut pandang Indonesia dan merupakan sintesis ke arah integrasi nasional. Oleh karena melalui pendidikan sejarah, sebuah komunitas atau bangsa/negara berusaha menggalang ketahanan agar entitas dan nilai-nilainya tetap ada dan berkembang. Konteks ini pendidikan sejarah bermakna sebagai upaya transmisi dan transformasi nilai-nilai yang dianut dan identitas yang dimiliki komunitas (sejarah lokal). Dengan menanamkan identitas dan spirit kebangsaan diharapkan para siswa nantinya menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) dan bertanggung jawab (Musadad, 2015; Purwanta, 2013; Suryadi et al., 2014; Zuhdi, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah dalam praktik pembelajaran sejarah di Papua terjadi integrasi (kesejajaran dan penyatuan) materi sejarah lokal (Ke-Papuaan) dan sejarah nasional (Ke-Indonesiaan). Selanjutnya akan terjadi penguatan relasi identitas Ke-Papuaan dan Ke-Indonesiaan di kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Kota Jayapura (Papua). Oleh karena itu, semangat merawat toleransi sesama anak bangsa (khususnya generasi muda) harus dikedepankan (Jati, 2017; Zuhdi, 2017). Setiap warga negara harus menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman serta mengeliminir perbedaan sebagai sumber pertentangan dan konflik yang akan merusak konstruksi Ke-Papuaan dan Ke-Indonesiaan. Hal ini menjadi salah satu tugas dan peran pendidikan sejarah, khususnya di

Kota Jayapura (Papua). Kota Jayapura sebagai “barometer” Provinsi Papua dan Papua Barat, dan “etalase” serta “miniatur” Indonesia memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pendidikan bagi generasi muda, khususnya kontribusi pendidikan sejarah dalam merawat kebhinekaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mengkaji Ke-Papuaan (konstruksi materi identitas lokal) melalui konten buku teks sejarah SMA berdasarkan Kurikulum 2013 dan diimplementasikan dalam pembelajaran sejarah SMA Kota Jayapura. Dalam konteks ini, buku teks ditempatkan sebagai dokumen historis yang mengandung pandangan subjektif pengarang yang terkait dengan kepentingan dan kekuasaan sebagai konteks dalam produksi dan reproduksi wacana serta asumsi, ideologi dan pesan yang diwacanakan dan disampaikan oleh penulis kepada siswa atau audien.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi adalah suatu metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narasi sejarah yang tertuang dalam buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA. Dengan demikian, sumber data penelitian ini adalah buku teks pelajaran Sejarah Indonesia SMA kelas X, XI dan XII Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemilihan atau alasan buku tersebut menjadi sumber data, karena buku tersebut merupakan buku yang resmi atau “official history” yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga misi pemerintah dalam interpretasi narasi sejarah tersebut diharapkan nampak dan mudah dianalisis (Mulyana, 2013, p. 80).

Teknik analisis yang digunakan dalam metode analisis ini, peneliti memberikan pemaknaan terhadap narasi pada buku teks Sejarah Indonesia SMA Kelas X, XI dan XII tersebut. Pemaknaan yang dilakukan dengan menggunakan konsep utama yaitu Papua (konten lokal Papua). Peneliti menganggap konsep ini mengandung ideologisasi dalam memberikan pemaknaan terhadap peristiwa sejarah yang dinarasikan pada buku teks pelajaran sejarah. Selanjutnya dari konsep utama tersebut kemudian direpresentasikan dalam dua tema yaitu: Ke-Papuaan dan integrasi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wacana Ke-Papuaan Dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 2013 Buku Teks Pelajaran Sejarah Nasional Indonesia SMA. Peneliti dalam kajian ini membatasi pada buku teks pelajaran Sejarah Indonesia SMA kelas X, XI dan XII Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemilihan buku teks tersebut dengan pertimbangan merupakan buku yang resmi diterbitkan oleh pemerintah, sehingga misi pemerintah dalam interpretasi narasi sejarah tersebut diharapkan nampak dan mudah dianalisis.

Peneliti memberikan pemaknaan terhadap narasi pada buku teks pelajaran Sejarah Indonesia SMA Kelas X, XI dan XII tersebut. Pemaknaan yang dilakukan dengan menggunakan konsep utama yaitu Papua (sejarah lokal). Peneliti menganggap konsep ini

mengandung ideologisasi dalam memberikan pemaknaan terhadap peristiwa sejarah yang dinarasikan pada buku pelajaran sejarah. Dari konsep tersebut kemudian dipetakan menjadi dua tema yang direpresentasikan dalam buku teks pelajaran Sejarah Indonesia yaitu tema sejarah Ke-Papuaan dan integrasi nasional.

Papua memiliki keragaman suku bangsa beserta sistem kebudayaannya (Afwan, 2015, p. 45). Minimnya narasi Papua dalam buku teks pelajaran Sejarah Nasional Indonesia SMA sudah ada sejak 1975 hingga era reformasi. Namun hal ini bukan berarti tidak terdapat fenomena historis tentang Papua di Indonesia. Akan tetapi para pengarang buku teks menempatkannya sebagai fenomena nasionalisme, bahwa proses pembentukan identitas Ke-Indonesiaan berjalan seiring dengan identitas etnik. Keduanya mengalami proses transformasi secara sinergis membentuk identitas masing-masing tanpa harus saling bertentangan. Buku teks pelajaran sejarah seharusnya menjelaskan proses transformasi tersebut dengan tanpa menghilangkan aspek kebhinekaan identitas masing-masing etnik.

Berdasarkan analisis peneliti tentang tema Ke-Papuaan (Gunawan et al., 2016) sebagai berikut. Pada Bab I: “Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia”, narasi Ke-Papuaan muncul pada bahasan ras Melanesoid. Berkaitan dengan ras Melanesoid dalam buku teks tersebut memaparkan:

Ras lain yang terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah Timur Irian dan benua Asutralia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan Papua-Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia dan Fiji, Vanuatu, mereka tergolong Melanesoid.

Selanjutnya kata Papua dicantumkan pada bagian “Mengamati Lingkungan”. “gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, gempa Yogyakarta, di Papua dan beberapa wilayah lain, termasuk beberapa gunung api meletus” (Gunawan et al., 2016).

Pandangan dari identitas lokal bahwa masyarakat nusantara dalam buku teks direpresentasikan sebagai orang-orang yang tidak menerima begitu saja pengaruh asing. Masyarakat lokal di nusantara digambarkan memiliki *local genius* sehingga melahirkan berbagai bentuk pembauran, akulturasi bahkan sinkretisme. *Local genius* merupakan kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Utami & Widiadi, 2016, p. 112).

Berikutnya pada Bab II: “Pedagang, Penguasa dan Pujangga pada Masa Klasik (Hindu dan Buddha)”, Sub bab B tentang Kerajaan-kerajaan pada Masa Hindu-Buddha. Narasi yang berkaitan tentang Papua hanya dibahas sekilas yakni sebagian wilayah Papua saat itu berada dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Narasi tentang kebesaran Kerajaan Majapahit pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang ada kaitannya dengan Papua sebagai berikut (Gunawan et al., 2016):

Menurut Kakawin Nagarakertagama pupuh XIII-XV daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina.

Majapahit juga memiliki hubungan dengan Campa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirimkan duta-dutanya ke Tiongkok.

Sementara itu, pada Bab III: “Islamisasi Islam ke Nusantara”, sub bab C tentang Islam Masuk Istana Raja. Narasi tentang Kerajaan-kerajaan Islam di Papua meliputi: (1) Kerajaan Waigeo; (2) Kerajaan Misool; (3) Kerajaan Salawati; (4) Sailolof; (5) Kerajaan Fatagar; (6) Kerajaan Rumbati yang terdiri dari Kerajaan Atiati, Sekar, Patipi, Arguni, dan Wertuar; (7) Kerajaan Kowiai (Namatota); dan (8) Kerajaan Kaimana (Gunawan et al., 2016, p. 229). Berkaitan dengan Islamisasi di Tanah Papua narasi buku Teks Sejarah SMA sebagai berikut (Gunawan et al., 2016, p. 231):

Proses Islamisasi di Papua terutama di pesisir barat terjadi pada pertengahan abad ke-15 yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan Islam di Maluku (Bacan, Ternate, dan Tidore). Hal ini didukung oleh faktor letaknya yang strategis, yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah (*spices road*) di dunia.

Selanjutnya berdasarkan analisis peneliti pada Buku Teks Sejarah Indonesia SMA Kelas XI Semester 1 Cetakan Ke-1 Tahun 2014 sebagai berikut (Sardiman & Lestariningsih, 2014, p. 62). Pada Bab 2 tentang “Perang Melawan Kolonialisme” – narasi Ke-Papuaan (Papua) sama sekali tidak ada. Selanjutnya, Pada Bab 3 tentang “Membangun Jati Diri Ke-Indonesiaan” – narasi tentang Ke-Papuaan (Papua) tidak ditampilkan.

Berikutnya berdasarkan analisis peneliti pada Buku Teks Sejarah Indonesia SMA Kelas XI Semester 2 Cetakan Ke-2 Tahun 2017 (Edisi Revisi) sebagai berikut (Sardiman & Lestariningsih, 2017): Bab 5 tentang “Tirani Matahari Terbit”, Bab 6 tentang “Indonesia Merdeka” dan Bab 7 tentang “Revolusi Menegakkan Panji-panji NKRI”. Konstruksi Ke-Papuaan (Papua) hanya muncul pada bab 7 sub bab B point ke-11 (Konferensi Meja Bundar), sebagai berikut: “Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, setelah pengakuan kedaulatan”.

Tema Integrasi Nasional Integrasi suatu bangsa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Zuhdi, 2017, p. 50). Dengan adanya integrasi akan melahirkan satu kekuatan bangsa yang ampuh dan segala persoalan yang timbul dapat dihadapi bersama-sama. NKRI adalah wujud konkret dari proses integrasi bangsa. Gagasan mengenai Indonesia sebagai wujud suatu negara bangsa memang baru muncul pada awal abad XX. Namun, proses kearah tersebut telah berlangsung sejak berabad-abad silam ketika Kepulauan Nusantara itu masih menjadi wilayah-wilayah mandiri.

Berdasarkan analisis peneliti tentang tema integrasi nasional pada Buku Teks Sejarah Indonesia SMA Kelas XII Cetakan Ke-2 Tahun 2018 (Edisi Revisi) adalah sebagai berikut (Abdurakhman et al., 2018). Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa (integrasi nasional) dapat dihubungkan dengan potensi konflik dan konflik di beberapa wilayah Indonesia dewasa ini. Oleh karena itu, pentingnya pembelajaran sejarah yang berisi materi dan dirancang untuk mengasah kompetensi pengetahuan siswa. Pelajaran Sejarah Indonesia membekali siswa dengan pengetahuan tentang dimensi ruang dan waktu dinamika sejarah Indonesia, keterampilan dalam menyajikan pengetahuan yang

dikuasainya secara konkret dan abstrak, serta sikap menghargai jasa para pahlawan, sehingga terbentuk pola pikir siswa yang sadar sejarah.

Salah satu guna sejarah adalah kegunaan edukatif yang mengandung makna mengambil hikmah dari pengalaman masa lampau dan relevansinya dengan masa kini. Konstruksi integrasi nasional di Papua nampak pada narasi daerah-daerah rawan konflik di Indonesia. Papua termasuk salah satu daerah rawan konflik, selain Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Akan tetapi narasi konflik di Papua tidak dideskripsikan secara luas. Selanjutnya integrasi nasional di Papua juga dikonstruksi melalui teladan para tokoh persatuan atau pahlawan nasional asal Papua. Namun dalam buku teks Kelas XII hanya menampilkan tiga pahlawan nasional asal Papua yaitu Frans Kaisiepo, Merthen Indey, dan Silas Papare (Abdurakhman et al., 2018). Salah satu pahlawan nasional asal Papua yang tidak dibahas dalam buku teks tersebut adalah Johannes Abraham Dimara. Seyogianya peran Johannes Abraham Dimara dalam perjuangan integrasi Papua ke NKRI juga ditampilkan dalam buku teks Sejarah Indonesia. Selanjutnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2020, masyarakat Papua patut bangga dengan dianugerahkan gelar pahlawan nasional kepada salah satu putra terbaik Papua, yakni Macmud Singgirei Rumagesan, Raja Sekar. Machmud S. Rumagesan adalah raja dari Kerajaan Sekar yang bergelar Raja Al Alam Ugar Sekar dari wilayah Sekar Fak-Fak. Pada masa Pemerintah Kolonial Belanda atau *Nederlands Nieuw Guinea* (NNG), Kerajaan Sekar berada di Distrik Kokas Onderafdeeling Fak-Fak, Afdeeling West Nieuw Guinea. Gelar ini diimplementasikan dalam kepemimpinannya yang menolak tunduk di bawah Pemerintahan Kolonial Belanda yang menimbulkan konflik berkepanjangan antara Rumagesan dan PKB (Sinaga & Syukur, 2013).

Narasi lain tentang Papua adalah pembebasan Irian Barat (Papua) yang menjadi salah satu isu politik yang terus bergema sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah penyerahan Irian Barat (Papua) ditangguhkan satu tahun kemudian. Namun hingga tahun 1960 persoalan Irian Barat belum dapat dituntaskan oleh Belanda dan Indonesia secara diplomasi meskipun PBB telah turun tangan. Akhirnya Presiden Sukarno pada tanggal 19 Desember 1961, di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikor) – komando untuk konfrontasi secara militer dengan Belanda. Isi Trikor adalah: (1) gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Salah satu dampak dari Trikor adalah ditandatangani Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962 antara Belanda dan Indonesia. Hal pokok dari Perjanjian New York adalah (Abdurakhman et al., 2018, p. 95):

“Penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah *United Nation Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan Perjanjian New York, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat

(Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari Pepera tersebut”.

Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Belanda-Indonesia dengan membuka kembali kedutaan masing-masing negara. Selanjutnya secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan Pemerintahan Irian Barat dari UNTEA kepada Pemerintah Republik Indonesia di Hollandia (Kota Baru/Jayapura) (Abdurakhman et al., 2018, p. 95):

“Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York, Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk melaksanakan *Act Free Choice* (Pepera). Pemerintah Indonesia menjalankan dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini sukses dijalankan oleh Pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi Perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara *de jure* dan *de facto* memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI”.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri adalah konflik yang terjadi di Tanah Papua. Narasi dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XII adalah sebagai berikut (Abdurakhman et al., 2018, p. 180):

“...upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua juga mengedepankan aspek dialog dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya keadilan bagi masyarakat Papua menimbulkan adanya perlawanan dan keinginan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Perhatian pemerintah sudah sewajarnya lebih diberikan untuk meningkatkan sisi ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat yang tinggal di wilayah ini melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka di bidang pertanian dan pemahaman birokrasi, terlebih Provinsi Papua memiliki sumber daya alam besar terutama di sektor pertambangan. Terkait dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua. Otonomi khusus tersebut diharapkan dapat memberikan porsi keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Kebijakan tersebut didukung oleh pemerintah melalui aliran dana yang cukup besar agar rakyat Papua dapat menikmati rasa aman dan tenteram di tengah derap pembangunan”.

KESIMPULAN

Dalam praktik pembelajaran sejarah SMA di Kota Jayapura guru dapat mengintegrasikan (kesejajaran dan penyatuan) materi sejarah lokal (Ke-Papuaan) dan sejarah nasional (Ke-Indonesiaan). Sehingga terjadi penguatan relasi identitas Ke-Papuaan dan Ke-Indonesiaan di kalangan Siswa SMA Kota Jayapura. Narasi dan konstruksi tersebut dalam kerangka menjembatani minimnya konten materi Ke-Papuaan dalam buku teks Sejarah Nasional SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kurikulum 2013). Guru sejarah SMA membekali diri dengan peningkatan kompetensi

profesional khususnya materi lokal Papua. Pembelajaran sejarah kritis dengan mengimplementasikan konsep ilmu sosial akan mendekatkan siswa dengan materi kelokalan (Ke-Papuaan), nasional dan global. Pendidikan sejarah memiliki kontribusi dalam merawat kebhinekaan khususnya di Kota Jayapura.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurakhman, P. A., Sunarti, L., & Zuhdi, S. (2018). *Sejarah Indonesia SMA Kelas XII, Cetakan Ke-2, Edisi Revisi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Afwan, B. A. (2015). *Mutiara Terpendam Papua: Potensi Kearifan Lokal untuk Perdamaian di Tanah Papua*. Sekolah Pascasarjana UGM.
- Gunawan, R., Lestariningsih, A. ., & Sardiman. (2016). *Buku Teks Sejarah Nasional Kelas X*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sardiman, & Lestariningsih, A. D. (2017). *Buku Teks Sejarah Indonesia SMA Kelas XI Semester 2 Cetakan Ke-2, Edisi Revisi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Jurnal Ilmiah

- Agung, L. S. (2014). Pengembangan Model KKBB Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sejarah SMA Di Solo Raya. *Jurnal Paramita*, 24(1), 126–136.
- Cowgill, D. ., & Waring, S. M. (2017). Historical Thinking: An Evaluation of Student and Teacher Ability to Analyze Sources. *Journal of Social Studies Education Research (JSSER)*, 8(1), 115–145.
- Jati, W. R. (2017). *Relasi Nasionalisme dan Globalisasi Kontemporer: Sebuah Kajian Konseptual*. Pustaka Pelajar.
- Mulyana, A. (2013). Nasionalisme dan Militarisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Jurnal Paramita*, 23(1), 78–87.
- Musadad, A. A. (2015). Model Manajemen Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Paramita*, 25(2), 103–112.
- Nafi'ah, U., & Utami, I. W. P. (2017). Development of Sigil Based E-Book As Media for “Technology and Information for History Learning” Course. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 103–112.
- Purwanta, H. (2013). Militer dan Konstruksi Identitas Nasional: Analisis Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Masa Orde Baru. *Jurnal Paramita*, 23(1), 88–102.
- Sardiman, & Lestariningsih, A. D. (2014). *Sejarah Indonesia SMA Kelas XI Semester 1 Cetakan Ke-1*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sinaga, R., & Syukur, A. (2013). *Machmud Singgirei Rumagesan: Pejuang Interaksi Papua*. Ruas.
- Suryadi, A., Hayat, B., Rustana, C., & Abduhzen, M. (2014). *Pendidikan untuk*

- Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa*. PT. Kompas Media Nusantara.
- Suryani, N. (2013). Pengembangan Model Internalisasi Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Model Value Clarification Technique. *Jurnal Paramita*, 23(2), 208–219.
- Sutiyah. (2013). Upaya Guru Sejarah Dalam Menyiasati Tuntutan Pemanfaatan ICT Dalam Pembelajaran Di SMA. *Jurnal Paramita*, 23(1), 106–117.
- Utami, I. W. P., & Widiadi, A. N. (2016). Wacana Bhineka Tunggal Ika Dalam Buku Teks Sejarah. *Jurnal Paramita*, 26(1), 106–117.
- Zuhdi, S. (2017). *Integrasi Bangsa Dalam Bingkai Keindonesiaan*. Wedatama Widya Sastra.